

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan, dengan melakukan penelitian di Kantor Kepala Desa, yang beralamatkan di Jalan Raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan – Madura.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Jenis penelitian ini memberikan penjelasan serta gambaran khususnya mengenai pengelolaan dana desa di Desa Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan tahun 2017 berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

C. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah satuan geografis yaitu Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan – Madura dengan objek penelitian mengenai laporan keuangan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

a Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tahun 2017. Data tersebut berupa laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, yang meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2017
2. Gambar Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun 2017
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) tahun 2017
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Larangan Tokol tahun 2017
6. Berita acara / daftar hadir musrenbang Desa Larangan Tokol tahun 2017
7. Struktur organisasi dan profil desa

b Data Primer

Data ini diperoleh dari hasil melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa yang merupakan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dan masyarakat di Desa Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan tentang akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Data primer ini digunakan untuk verifikasi data sekunder yang telah diperoleh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Penelitian dengan metode wawancara, yaitu tanya jawab dengan para informan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan terkait dengan pengelolaan keuangan desa dengan cara bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai yang dibantu dengan alat perekam. Adapun yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Bendahara Desa
4. Masyarakat

b. Dokumen atau Arsip

Dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Disamping memperoleh dari keterangan-keterangan dari responden melalui wawancara, penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan ADD.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Desa Larangan Tokol. Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisis data terhadap pengelolaan alokasi dana desa dengan menggunakan beberapa indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang disesuaikan dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Indikator akuntabilitas yang telah disesuaikan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai berikut:
 - a. Pada tahap proses Perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - 1) Kepala Desa menyusun RPJMDes untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMDes diterapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
 - 2) Kepala Desa bersama BPD menyusun RKPDes. Penyusunan RKPDes diselesaikan paling lambat akhir bulan januari tahun anggaran sebelumnya.
 - 3) Sekertaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes.
 - 4) Sekertaris Desa melaporkan rancangan peraturan dana tentang APBDes kepada Kepala Desa

- 5) Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan dana tentang APBDes kepada BPD untuk dibahas bersama, paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- b. Pada tahap proses Pelaksanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.
 - 2) Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
 - 3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
 - 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan ke Kepala Desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Pada tahap proses Penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- 1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara rutin.
 - 2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- d. Pada tahap proses Pelaporan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota melalui pihak kecamatan berupa: laporan

semester pertama yaitu laporan realisasi APBDes dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pada tahap proses Pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota melalui pihak kecamatan setiap akhir tahun anggaran berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan januari tahun berjalan berikutnya.
- 2) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi.

2. Melakukan analisis data terhadap pengelolaan alokasi dana desa dengan menggunakan beberapa indikator transparansi pengelolaan keuangan desa yang disesuaikan dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Indikator transparansi yang telah disesuaikan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a Desa Menginformasikan jumlah dana ADD yang diterima pada saat Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 - b Tersedianya laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang dengan mudah diakses masyarakat
 - c Desa terbuka mempublikasi atau mengumumkan saat Musrenbang tentang kebijakan mengenai pengelolaan alokasi dana desa
 - d Terdapat media pemberian informasi kepada publik mengenai pelaksanaan program seperti papan pengumuman, baliho, dll.
 - e Tersedianya sarana untuk suara atau usulan masyarakat
 - f Adanya kerjasama untuk meningkatkan arus informasi dengan media massa dan lembaga non pemerintahan
3. Melakukan analisis data terhadap pengelolaan alokasi dana desa dengan menggunakan beberapa indikator partisipasi masyarakat pengelolaan keuangan desa yang disesuaikan dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Indikator partisipasi masyarakat yang telah disesuaikan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebagai berikut:
- a Desa mengundang masyarakat untuk menghadiri musrenbangdes tingkat desa
 - b Desa Memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan, dan hasil notulen)
 - c Masyarakat merasakan manfaat dari pengelolaan dana alokasi dana desa yang sudah direncanakan.

- g Desa Menginformasikan jumlah dana ADD yang diterima pada saat Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 - h Tersedianya laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang dengan mudah diakses masyarakat
 - i Desa terbuka mempublikasi atau mengumumkan saat Musrenbang tentang kebijakan mengenai pengelolaan alokasi dana desa
 - j Terdapat media pemberian informasi kepada publik mengenai pelaksanaan program seperti papan pengumuman, baliho, dll.
 - k Tersedianya sarana untuk suara atau usulan masyarakat
 - l Adanya kerjasama untuk meningkatkan arus informasi dengan media massa dan lembaga non pemerintahan
4. Melakukan analisis data terhadap pengelolaan alokasi dana desa dengan menggunakan beberapa indikator partisipasi masyarakat pengelolaan keuangan desa yang disesuaikan dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Indikator partisipasi masyarakat yang telah disesuaikan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebagai berikut:
- d Desa mengundang masyarakat untuk menghadiri musrenbangdes tingkat desa
 - e Desa Memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan, dan hasil notulen)
 - f Masyarakat merasakan manfaat dari pengelolaan dana alokasi dana desa yang sudah direncanakan.

g Masyarakat desa ikut mengawasi pelaksanaan realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa Larangan Tokol.

5. Menilai Tingkat akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

Rumus yang digunakan:

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{\text{Jumlah Indikator Terpenuhi}}{\text{Jumlah Indikator Ideal}} \times 100\%$$

Setelah dihitung tingkat implementasi permendagri nomor 113 tahun 2014, dengan cara jumlah indikator terpenuhi dibagi dengan jumlah indikator ideal dikali 100 persen, maka untuk dapat dikatakan sesuai atau tidak. Pengelolaan keuangan APBDes menggunakan pengukuran

Tabel 3.1

Klasifikasi Tingkat Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Indeks Indikator %	Kriteria Akuntabilitas	Kriteria Transparansi	Kriteria Partisipasi Masyarakat
0 – 25	Sangat Kurang Akuntabel	Sangat Kurang Transparan	Sangat Kurang Partisipasi
26 -50	Kurang Akuntabel	Kurang Transparan	Kurang Partisipasi
51 – 75	Cukup Akuntabel	Cukup Transparan	Cukup Partisipasi
76 - 100	Akuntabel	Transparan	Partisipasi

Sumber : Data Olahan Pribadi

6. Menarik kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan pada Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tentang akuntabilitas,

transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

